

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung, Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah cukup baik, dengan melihat Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi yang menjadi bagian terpenting bagi terlaksananya Kebijakan ini. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K), yaitu membangun masyarakat mandiri melalui Pemberdayaan Ekonomi, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Kelurahan Balai Agung terlebih dahulu memberikan sosialisasi terkait cara memulai Ekonomi Kreatif sehingga meminimalisir adanya kegagalan yang kemudian menjadi masalah bagi Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan.

Selanjutnya Keberhasilan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini penulis melihat dari empat aspek penting. Pertama melihat bagaimana Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kelurahan Balai Agung dan Komunikasi yang dilakukan Kelurahan Balai Agung dengan Masyarakat. Kedua adalah Penilaian dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya financial. Ketiga adalah melihat bagaimana Sikap dari Implementasi Kebijakan ini dan yang Keempat adalah

penulis mencoba mengkaitkan antara struktur Organisasi dengan kinerja yang di miliki oleh Implementator Kebijakan ini.

Berdasarkan hasil analisis data peneliti, dapat disimpulkan bahwasannya Kehadiran Implementasi Kebijakan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan segala aspek kehidupan di Kelurahan Balai Agung. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil analisis data penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung Kabupaten Musi Banyuasin.

A.4.1 Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung Kabupaten Musi Banyuasin

1. Hasil Penelitian dengan merujuk pada aspek Komunikasi, menunjukkan bahwa Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Kelurahan Balai agung sudah dilakukan dengan Baik, begitu pula komunikasi yang dilakukan Kelurahan Balai Agung dengan Masyarakat. Komunikasi yang baik ini berdampak positif bagi terlaksananya Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.
2. Salah satu faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan ini adalah Sumber Daya. Sumber Daya pertama, Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini memiliki Sumber Daya Manusia yang baik sehingga dapat mendukung adanya terlaksananya Kebijakan alokasi Dana Desa/Kelurahan ini

3. Sikap Pelaksana sudah menunjukkan bahwa mereka sudah melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundangan. Sikap pelaksana kebijakan ini didukung dengan adanya peraturan yang mengharuskan Pelaksana Kebijakan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
4. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Struktur Organisasi dalam kebijakan ini telah mengacu pada SOP yang berasal dari Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013.

A.4.2 Perkembangan di Kelurahan Balai Agung setelah berlakunya Alokasi Dana Desa/Kelurahan

1. Melihat dari sisi Anggaran untuk Desa, Alokasi Dana Desa/Kelurahan memberikan dampak positif ini terlihat dari adanya penambahan dana untuk Kelurahan Balai Agung sebesar Rp. 1.709.583.706.
2. Melihat dari sisi Gaji Tunjangan Aparatur Desa, Alokasi Dana Desa/Kelurahan memberikan dampak positif bagi Aparatur Pemerintahan Kelurahan di Kelurahan Balai Agung. Ini terlihat dari Gaji dan Tunjangan yang diberikan bertambah hingga Rp.150.000.' sampai Rp.300.000.' dari gaji dan tunjangan sebelumnya.
3. Melihat dari sisi Biaya Operasional Desa Kelurahan Balai Agung mendapatkan tambahan biaya Operasional Desa sebesar Rp

4. Dari sisi Pemberdayaan Ekonomi, Alokasi Dana Desa memberikan Dana khusus sebesar Rp.586.053.000' dimana pada Tahun 2012 tidak ada anggaran untuk Pemberdayaan Ekonomi.
5. Sedangkan jika melihat dari sisi Pembangunan Fisik Alokasi Desa memberikan dampak positif bagi Perkembangan Pembangunan di Kelurahan Balai Agung yang terlihat dari adanya penambahan anggaran sebesar Rp.836.580.000.' untuk pembangunan fisik di Kelurahan Balai Agung.

B. REKOMENDASI

1. Kelurahan Balai Agung sebaiknya memberikan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut Ekonomi Kreatif kepada Masyarakat sehingga mengurangi adanya kebingungan Masyarakat dalam memulai pengelolaan keuangan bantuan dari Kebijakan ini.
2. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan laporan pelaksanaan serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibuatkan SOP untuk mekanisme dan bentuk pembuatan Laporan, mekanisme dan pembuatan laporan ini terorganisir menggunakan Komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.
3. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan

sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk Masyarakat, Jangan sampai Kemudian menjadi Kebijakan yang Politis yang bertujuan untuk mendongkrak nama salah satu pihak atau pemerintah semata. Diharapkan Kebijakan ini dalam pelaksanaan ditahun berikutnya dapat memperbaiki kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya sehingga Kebijakan ini akan terlihat jelas Tujuan dan Manfaatnya